

Implementasi Kebijakan Penguatan Karakter: Studi Kasus pada Jenjang SMP di Kabupaten Lebak

Implementation of Character Building Policy: A Case Study at Junior High Schools in Lebak Regency

doi: 10.24832/jpnk.v9i2.4558

Andreas Yoga Aditama, Hamka, Asropi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta - Indonesia

Email: andreas.yoga@kemdikbud.go.id

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Vol. 9, Nomor 2, Desember 2024

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 11-12-2023

Naskah disetujui: 04-11-2023

Terbit: 31 Desember 2024

Abstract: *This study aims to explore the implementation of character strengthening programs at the junior high school level in Lebak Regency, identify obstacles to implementation, and develop strategic recommendations that can accelerate the implementation. This study used a qualitative method with a case study approach. The subjects of this study were stakeholders at the junior high school level (SMP) in Lebak Regency, Banten Province. The Data sources for the qualitative research were interviews with informants, documentation studies, and questionnaires that were analyzed based on the policy implementation model by Van Meter and Van Horn. The results of the study indicate that the Lebak Regency Regional Government has not yet developed a policy document that can serve as a reference for budget planning and character strengthening programs so that further intervention by the local government, namely the Lebak Regency Education Office, is still limited. This situation has created a gap in teachers' understanding of instilling the values of the Pancasila student profile and has limited the active participation of parents and the community in character strengthening both inside and outside the school. Therefore, a strategy is needed to overcome this problem, starting from advocacy for the preparation of character strengthening policy documents in Lebak Regency, increasing teacher capacity, and actively involving parents and education partners. In conclusion, implementation of character strengthening policies at the junior high school level in Lebak Regency requires collaboration between local governments, schools, parents, and the community. To support the successful implementation of this policy, it is necessary to formulate clearer and more structured policies in addition to increasing the capacity of all related parties.*

Keywords: *policy implementation, character strengthening, Profil Pelajar Pancasila*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program penguatan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lebak, mengidentifikasi penghambat implementasi, dan menyusun rekomendasi strategi untuk mempercepat implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan subjek penelitian yaitu para pemangku kepentingan pada jenjang SMP di Kabupaten Lebak, Banten. Sumber data penelitian adalah wawancara*

terhadap informan, studi dokumentasi, dan angket/kuesioner yang dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak belum memiliki dokumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan anggaran dan program penguatan karakter sehingga intervensi lanjutan pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak masih terbatas. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman guru terhadap pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan terbatasnya partisipasi aktif orang tua dan komunitas dalam penguatan karakter di dalam dan luar sekolah. Untuk itu, diperlukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu advokasi penyusunan dokumen kebijakan penguatan karakter, peningkatan kapasitas guru, serta pelibatan aktif orang tua dan mitra pendidikan. Kesimpulan, implementasi kebijakan penguatan karakter pada Jenjang SMP di Kabupaten Lebak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut diperlukan penyusunan kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur di samping peningkatan kapasitas semua pihak terkait.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, penguatan karakter, profil pelajar Pancasila*

PENDAHULUAN

Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menggaungkan kebijakan penguatan karakter sebagai salah satu solusi menghadapi tantangan perubahan dan kompetisi di masa depan. Pendidikan karakter berkontribusi positif terhadap pencapaian akademik dalam pembelajaran (Jeynes, 2017; Lavy, 2020). Selain itu, jika sesuai dengan kebutuhan zaman pendidikan karakter dapat mendukung produktivitas ketika menjadi angkatan kerja (Cohen, Panter, Turan, Morse, & Kim, 2014); (Harzer, Bezuglova, & Weber, 2021).

Penguatan pendidikan karakter di Indonesia yang saat ini dikenal dengan istilah penguatan karakter, merujuk pada upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (Propela). Propela adalah

karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik dan setiap warga Indonesia agar mampu melewati tantangan di masa depan tanpa melepas jati diri bangsa (Anggraena, Sufyadi, Maisura, Chodidjah, Takwin, Cahyadi, et al 2020; Rusnaini, Raharjo, Suryaningsih, & Noventari, 2021). Tingkat tertinggi keberhasilan implementasi penguatan karakter adalah ketika peserta didik sudah secara proaktif dan konsisten menerapkan Propela dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana tercermin pada Gambar 1.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggunakan berbagai pendekatan untuk penguatan karakter mulai dari intrakurikuler dengan Kurikulum Merdeka (Ardianti & Amalia, 2022), kokurikuler dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Safitri, Wulandari, & Herlambang, 2022; Satria, Adiprima, Wulan, & Harjatanaya, 2022), kampanye publik melalui media terkemuka dan media sosial, serta aktivitas ekstrakurikuler yang terkait. Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud-



Gambar 1 Dimensi Propela

Sumber: Pusat Penguatan Karakter (2021)

ristek merupakan koordinator penguatan karakter terutama dalam kampanye publik.

Penguatan karakter diimplementasikan secara kolaboratif oleh Puspeka Kemendikbud-ristek bersama pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini melibatkan peran aktif sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini juga mendapat dukungan dari komunitas pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DUDI), organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan amanat pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan pasal 9 Peraturan Mendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Setiap pemangku kepentingan perlu melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing agar kebijakan penguatan karakter terlaksana secara menyeluruh.

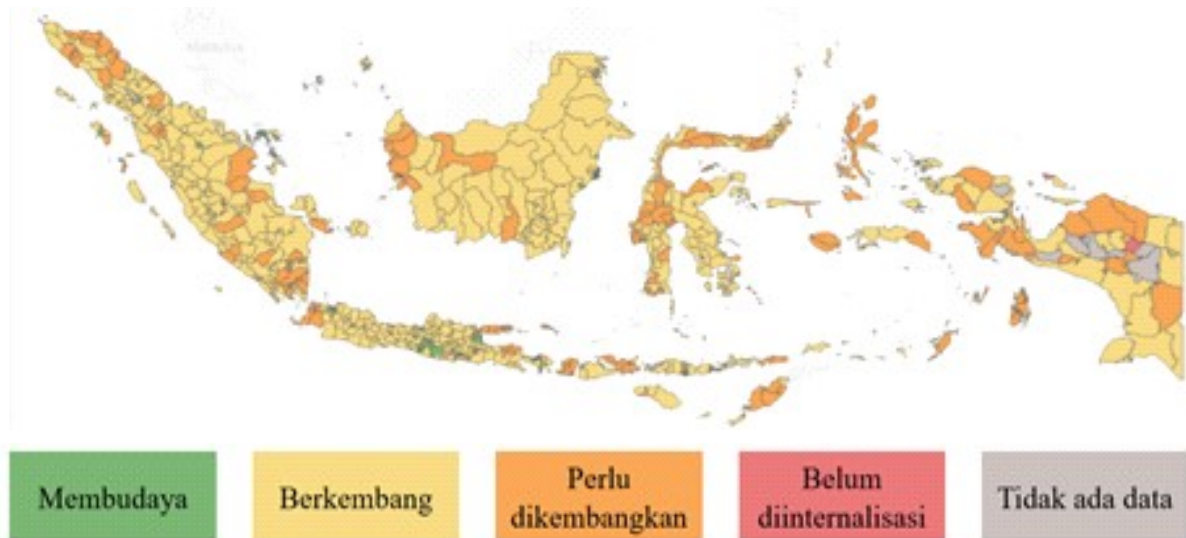
Pemerintah pusat dan daerah menyiapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan penguatan karakter dengan peraturan, program, panduan, materi, dan hal pendukung lain. Sekolah menjadi tempat penting untuk pendidikan karakter melalui pendekatan pembelajaran dan aktivitas di sekolah (Hamzah, Mujiwati, Khamdi, Usman, & Abidin, 2022). Orang tua memiliki peran penting sebagai panutan dan mendukung nilai karakter yang ditanamkan di sekolah (Shubert, Wray-Lake,

Syvertsen, & Metzger, 2022). Komunitas dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga dapat berkontribusi dalam hal materi, kepakaran, atau model program penguatan karakter.

Capaian penguatan karakter di Indonesia diukur melalui survei karakter sebagai bagian dari asesmen nasional (AN) yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2021. Hasil survei karakter dipublikasikan sebagai indeks karakter dalam rapor pendidikan nasional dan setiap daerah di Indonesia. Salah satu temuan dalam Rapor Pendidikan 2022 adalah terdapat 20% atau 105 daerah yang memiliki indeks karakter kurang baik (memerlukan peningkatan) pada jenjang SMP (Pusat Asesmen Pendidikan, 2022). Rata-rata siswa di daerah (kabupaten dan kota) masih memerlukan dukungan untuk menerapkan Propela dalam kehidupan sehari-hari kendati sudah menyadari pentingnya Propela. Gambar 2 memperlihatkan daerah dengan indeks karakter rendah pada jenjang SMP tahun 2022 tersebar di 25 provinsi dan di semua pulau besar di Indonesia

Permasalahan dalam implementasi penguatan karakter yang terpotret dari data capaian indeks karakter jenjang SMP ini merupakan tantangan besar dalam penyiapan generasi emas Indonesia 2045. Daerah dengan capaian indeks karakter rendah perlu didorong untuk segera melakukan perbaikan karena durasi bonus demografi yang terbatas (Adriani & Yustini, 2021). Terhitung dari tahun 2023, jumlah angkatan kerja yang masih bersekolah hingga tahun 2040 sebanyak 18,9 juta (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2020). Idealnya, semakin banyak lulusan dengan pengamalan Propela yang konsisten akan berkontribusi positif terhadap performa kinerja angkatan kerja generasi emas.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2022 (Pusat Asesmen Pendidikan, 2022). Kabupaten Lebak adalah salah satu daerah dengan capaian indeks karakter jenjang SMP yang kurang baik



Gambar 2 Indeks Karakter Jenjang SMP 2022

Sumber: Diolah penulis (2023) dari Rapor Pendidikan 2022

pada tahun 2022 dengan indeks karakter berada pada desil kedua terakhir (81-90%) dari kabupaten dan kota se-Indonesia. Pada Rapor Pendidikan juga didapatkan bahwa di Kabupaten Lebak ada kesenjangan indeks karakter antara wilayah urban dan rural, serta memiliki indeks literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum.

Dalam survei yang dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter pada tahun 2022, diketahui bahwa Kabupaten Lebak belum memiliki kebijakan daerah yang dapat digunakan sebagai landasan hukum program penguatan karakter Propela di daerah. Hal ini terlihat dengan belum ada intervensi khusus terkait penguatan karakter Propela. Pelaksanaan penguatan karakter di sekolah berjalan secara mandiri sesuai dengan kurikulum dengan intervensi terbatas dari pemerintah daerah.

Sejauh ini belum ada publikasi yang membahas permasalahan implementasi kebijakan penguatan karakter di tingkat daerah, khususnya di daerah dengan capaian penguatan karakter yang rendah berdasarkan Rapor Pendidikan seperti di Kabupaten Lebak. Diskusi yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dan Dinas Pendidikan Kabupaten mengenai implementasi kebijakan publik terkait

penguatan karakter di Kabupaten Lebak bersifat internal dan belum bisa diakses oleh pemangku kepentingan seperti orang tua dan komunitas untuk bisa terlibat lebih aktif dalam penguatan karakter.

Model implementasi Van Meter dan Van Horn melihat implementasi suatu kebijakan publik sebagai proses penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional yang nyata oleh organisasi publik. Penerjemahan tersebut bertujuan mencapai perubahan yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tidak hanya berlangsung dalam waktu tertentu, tetapi berlanjut terus hingga mencapai tujuan secara efektif (Winarno, 2016). Model implementasi Van Meter dan Van Horn dianggap sesuai untuk melihat implementasi kebijakan penguatan karakter yang berasal dari pemerintah pusat, diteruskan oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan dengan penyesuaian sesuai perkembangan zaman dan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan penguatan karakter pada jenjang SMP di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan penguatan karakter pada Jenjang

SMP di Kabupaten Lebak, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi, dan menyusun rekomendasi strategi yang dapat mempercepat implementasi penguatan karakter.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus yaitu penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam dengan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan sejumlah prosedur pengumpulan data sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Creswell, 2012). Lokus penelitian dibatasi hanya pada jenjang SMP di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terhadap informan, studi dokumentasi, dan angket/kuesioner. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, yaitu peneliti dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan wawancara tetapi dapat berkembang secara dinamis (Arikunto, 2016).

Instrumen wawancara dikembangkan dari model implementasi kebijakan Van Meter dan van Horn (Winarno, 2016) seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan	
No.	Faktor
1	Ukuran dasar dan tujuan kebijakan 1a. Pedoman kebijakan 1b. Indikator pelaksanaan kebijakan
2	Sumber-sumber kebijakan 2a. Sumber daya manusia 2b. Sumber daya anggaran
3	Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan 3a. Komunikasi pusat dan daerah 3b. Konsistensi komunikasi 3c. Kejelasan komunikasi 3d. Kegiatan pelaksanaan
4	Kencenderungan pelaksana 4a. Pemahaman tujuan kebijakan

- 4b. Tanggapan dan intensitas tanggapan/tendensi
- 5 Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
 - 5a. Kondisi ekonomi
 - 5b. Kondisi sosial
 - 5c. Kondisi politik
- 6 Karakteristik pelaksana
 - 6a. Vitalitas organisasi
 - 6b. Kontrol melalui pemantauan/evaluasi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Informan dalam wawancara adalah Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Kepala Bidang SMP dan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (Kasi PDPK SMP), kepala sekolah dan guru dari enam SMP yang dipilih secara purposif untuk mewakili kategori capaian indeks karakter atas, menengah, bawah, kategori implementasi kurikulum merdeka dan persebaran geografis. Enam SMP yang dipilih tersebut adalah SMPN 1 Rangkasbitung, SMPN 2 Rangkasbitung, SMPN 4 Leuwidamar, SMPN 2 Kalanganyar, SMPN 2 Wanasalam, dan SMPN 4 Cijaku.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen secara sistematis sehingga menghasilkan data yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2011). Dokumen yang digunakan untuk studi dokumentasi antara lain peraturan terkait penguatan karakter di pemerintah daerah Kabupaten Lebak dan Kemendikbudristek, Rapor Pendidikan tahun 2022, Neraca Pendidikan tahun 2022, dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu tahun 2023.

Angket/kuesioner yang digunakan berbentuk pertanyaan terbuka yang dipasang dalam formulir daring. Pertanyaan terbuka bersifat eksploratori yang memungkinkan peserta menjawab secara bebas tanpa terpengaruh pilihan jawaban yang disediakan

penulis (Hansen & Świdarska, 2023). Angket ini digunakan untuk mengidentifikasi pembiasaan karakter Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah, baik di dalam maupun di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Angket disebarakan kepada 183 sekolah dan direspon oleh 142 sekolah. Sebanyak 124 sekolah menjawab lengkap dan 18 sekolah menjawab tidak lengkap. Setiap jawaban lengkap dikategorisasi ke dalam dimensi dan elemen Profil Pelajar Pancasila sesuai Keputusan Ka.BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022).

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi sesuai dengan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010). Setelah pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan angket, reduksi data dilakukan untuk mengubah data menjadi ringkas dan fokus pada pertanyaan penelitian.

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk antara lain teks naratif, tabel, diagram, dan lain-lain agar memudahkan dalam memahami fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dan bersifat sementara sampai diperoleh kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Semua kesimpulan diverifikasi dengan bukti-bukti yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penguatan Karakter

Berdasarkan wawancara Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan dokumentasi, terdapat kebijakan penguatan karakter yang telah dilakukan oleh Kabupaten Lebak. Terkait sosialisasi ke peserta didik, dinas pendidikan menyisipkan materi Profil Pelajar Pancasila yang disusun oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek dalam materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Selain

itu, sosialisasi disiplin positif saat upacara di sekolah yang melibatkan kepolisian sektor dan sosialisasi kesehatan reproduksi yang melibatkan dinas pendidikan. Pada tahun 2023, dimulai penandatanganan pakta integritas *antibullying* (anti-perundungan) di beberapa SMP.

Terkait pelatihan, Puspeka Kemendikbudristek telah melatih fasilitator guru melalui Program Roots Antiperundungan SMP di 20 sekolah pada tahun 2022 dan 56 sekolah pada tahun 2023. Direktorat SMP bekerja sama dengan Setara Institute dan UNICEF mengikutsertakan guru Bimbingan Konseling dan wakil kepala sekolah kesiswaan dari 21 SMP dalam "Workshop Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila jenjang SMP" pada tahun 2023. Dinas pendidikan juga memfasilitasi program pelatihan kurikulum merdeka yang diinisiasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten.

Permasalahan Implementasi

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2022, capaian indeks karakter Kabupaten Lebak jenjang SMP masih rendah. Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan dalam implementasi, berikut analisis berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn:

Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan dasar dan tujuan kebijakan, semakin jelas kedua hal tersebut maka semakin terarah dan realistis proses implementasinya. Menurut Van Meter dan Van Horn, ukuran dasar kebijakan dapat terlihat dari regulasi dan pedoman kebijakan (Winarno, 2016).

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan karakter di Kabupaten Lebak mengikuti kebijakan pemerintah pusat tanpa adanya penyesuaian dengan kondisi daerah. Kabupaten Lebak belum memiliki peraturan turunan terkait penguatan karakter yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan Propela. Selain itu, belum ada program

kegiatan yang berkaitan dengan penguatan karakter Propela dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan rencana strategis dinas pendidikan 2019-2024 yang dapat digunakan sebagai acuan evaluasi program penguatan karakter. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menyampaikan:

“Secara umum belum ada program maupun panduan khusus untuk penguatan karakter. Peraturan terkait ada yaitu penyelenggaraan pendidikan, wajib belajar madrasah diniyah, sekolah ramah anak, dan Pendidikan antikorupsi” (Informan 3: 4 Oktober 2023)

Mengacu pada ukuran dasar dan tujuan kebijakan penguatan karakter pemerintah pusat yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah seperti terlihat pada Tabel 2.

Beberapa peraturan daerah yang terkait dinilai belum dapat mendukung implementasi penguatan karakter. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan beririsan dengan penguatan karakter, tetapi belum bisa digunakan sebagai dasar perencanaan program/kegiatan daerah. Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak belum memiliki pengaruh pada RKPD dinas pendidikan pada tiga tahun terakhir.

Kemendikbudristek mengintegrasikan penguatan karakter dalam implementasi Kurikulum Merdeka sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan penguatan karakter (Safitri *et al.*, 2022). Kendati tidak ada intervensi khusus dari pemerintah daerah, penguatan karakter akan terinisiasi melalui dorongan kurikulum jika sekolah sudah beralih ke Kurikulum Merdeka. Potensi permasalahan adalah pada saat transisi guru melakukan pembiasaan ke kurikulum baru yang menyebabkan pelaksanaan penguatan karakter belum optimal (Ardianti & Amalia, 2022).

Berdasarkan analisis di atas, tidak adanya ukuran standar dan tujuan kebijakan penguatan karakter di Kabupaten Lebak menghambat inovasi dan fleksibilitas dinas pendidikan dalam mendorong implementasi penguatan karakter di sekolah.

Tabel 2 Sandingan Tanggung Jawab dan Implementasi Penguatan Karakter di Kabupaten Lebak

Tanggung Jawab	Implementasi
Penyusunan kebijakan dan rencana aksi	Belum ada rencana aksi, belum ada peraturan turunan terkait yang dapat digunakan sebagai landasan hukum hingga Tahun Anggaran 2023 (lihat Tabel 1, poin 1)
Sosialisasi, pelaksanaan, dan koordinasi	Tidak dilakukan spesifik untuk penguatan karakter, tetapi berkaitan dengan kurikulum (lihat Tabel 1, poin 1)
Pelaksanaan kerja sama	Diinisiasi oleh instansi luar (lihat Tabel 1, poin 3)
Penyediaan anggaran	Tidak tersedia hingga Tahun Anggaran 2023
Penyediaan sumber daya	Tersedia terbatas (lihat Tabel 1, poin 2)
Pemantauan dan evaluasi	Belum dilaksanakan hingga Tahun Anggaran 2023
Pelaporan	Belum dilaksanakan hingga Tahun Anggaran 2023

Sumber: olahan penulis berdasarkan Wawancara Implementasi

Sumber-sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya yang disiapkan untuk memfasilitasi kebijakan seperti anggaran, manusia, dan insentif lainnya (Hartawan & Kosasih, 2023). Sebagai dampak dari tidak adanya landasan hukum dan/atau kebijakan penguatan karakter adalah terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran.

Tidak adanya payung anggaran penguatan karakter dalam RKPD, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak membatasi bentuk intervensi pada kegiatan yang relatif minim biaya. Misalnya, membatasi intervensi anggaran pada penyematan materi Propela saat MPLS pada panduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penandatanganan Pakta Integritas Anti Perundungan.

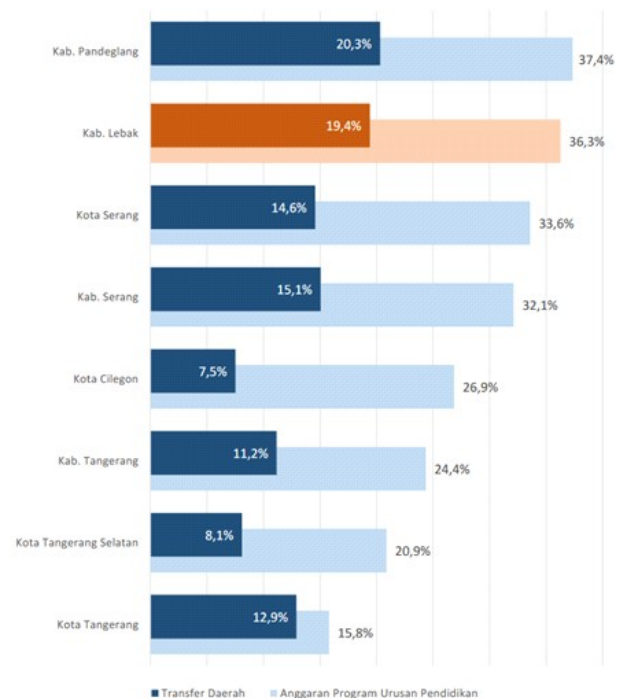
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah 2022 (Kemendikbudristek, 2022), Kabupaten Lebak tercatat memiliki porsi anggaran pendidikan terbesar kedua di Provinsi Banten yaitu 36,3%, berada di bawah Kabupaten Pandeglang (Gambar 3). Jika dilihat dari besar anggaran pendidikan, Kabupaten Lebak berada di posisi ketiga dengan anggaran sebesar Rp956 miliar, hanya di bawah Kabupaten Tangerang (Rp1.634,5 miliar) dan Kabupaten Serang (Rp1.001,5 miliar). Hal ini menunjukkan potensi sumber daya anggaran untuk pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sebagian dapat dialihkan ke penguatan karakter.

Terkait sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memiliki seksi yang menangani penguatan karakter yaitu Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (PDPK). Seksi PDPK jenjang SMP hanya memiliki tiga pegawai termasuk kepala seksi. Berdasarkan wawancara kepada kepala seksi, fokus pekerjaan lebih condong pada sisi pemenuhan kebutuhan sekolah terkait peserta didik daripada pembangunan karakter.

"Belum ada penambahan jumlah pegawai pada 2 tahun terakhir. Tugas pada Seksi

PDPK terkait peserta didik seperti dapodik, perlombaan, pendampingan, monev, dan lainnya sudah membuat kami kewalahan." (Informan 4: 4 Oktober 2023).

Jika dilihat dari implementasi di sekolah, kuantitas dan kualitas guru yang mengampu penguatan karakter menjadi penting. Guru bimbingan dan konseling (BK) merupakan koordinator kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) siswa di sekolah. Peran guru BK dalam Kurikulum Merdeka semakin banyak yang berkaitan dengan penguatan karakter Propela (Azwar, 2023). Berdasarkan wawancara, di Kabupaten Lebak hanya terdapat 20 guru BK dan hanya 6 yang berstatus PNS. Hal ini menunjukkan sekitar 90% SMP di Kabupaten Lebak belum memiliki guru BK yang berfokus pada penguatan karakter siswa. Sekolah tanpa koordinator penguatan karakter tidak memiliki inisiator dan fasilitator sehingga penguatan karakter berjalan secara pasif.



Gambar 3 Porsi Anggaran Pendidikan dalam APBD 2022

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Kemendikbudristek, 2022)

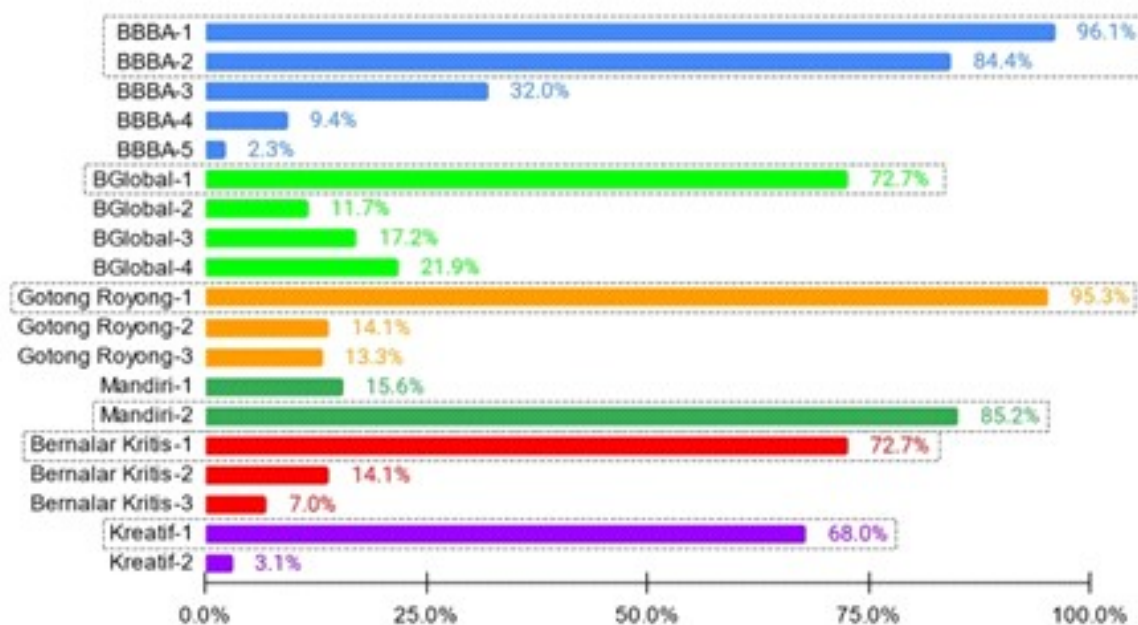
Selain itu, berdasarkan analisis kuesioner pemahaman guru terlihat bahwa tidak semua guru memahami pembiasaan untuk setiap dimensi dan elemen Propela. Total pembiasaan Propela yang sesuai dengan dimensi dan elemennya di setiap SMP di Kabupaten Lebak hanya 38,7% (rata-rata) atau 36,8% (median). Ada kecenderungan generalisasi atau menjadikan nilai menjadi lebih unik/tunggal dari yang sebenarnya (Blair, 2019) di mana pembiasaan sebagian elemen sudah merepresentasi semua elemen dalam dimensi. Contoh fenomena ini adalah generalisasi bahwa rajin beribadah sudah mewakili dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak Mulia (BBBA) dan mengerjakan tugas sendiri sudah mewakili dimensi mandiri. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakmerataan pemahaman pembiasaan dalam setiap dimensi Propela seperti yang ditunjukkan Gambar 4.

Berdasarkan analisis di atas, keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, menghambat implementasi penguatan karakter secara optimal. Hal yang dibutuhkan

oleh guru-guru SMP di Kabupaten Lebak adalah peningkatan kapasitas terkait penguatan karakter Propela dan penambahan jumlah guru BK atau perekrutan ahli. Anggaran pendidikan Kabupaten Lebak memiliki potensi untuk realokasi anggaran untuk mendukung penguatan karakter.

Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi yang baik memastikan kesamaan dalam pemahaman dan persepsi antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Jika kesamaan tersebut tercapai, maka kebijakan dapat diimplementasikan sesuai rencana (Winarno, 2016). Penguatan karakter adalah kebijakan pusat yang diteruskan ke daerah. Puspeka selaku koordinator penguatan karakter telah melakukan sejumlah sosialisasi baik daring dan luring sejak tahun 2020 untuk memastikan semua daerah mendapatkan pemahaman terkait Propela. Kabupaten Lebak sudah menerima sosialisasi Propela dari Puspeka pada tahun 2022.



Gambar 4 Pemahaman Guru SMP di Kabupaten Lebak terkait Pembiasaan Propela
Sumber: Angket Pembiasaan Karakter Propela di Sekolah

Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak telah menyampaikan imbauan tentang urgensi Propela dalam kegiatan pertemuan dengan kepala sekolah. Namun, sejauh ini belum ada penyebaran, produksi, atau penggandaan konten penguatan karakter yang berasal dari dinas pendidikan untuk sekolah. Sekolah yang telah menerapkan sebagian atau penuh Kurikulum Merdeka mendapatkan informasi terkait Propela dari perangkat ajar dan akses ke Platform Merdeka Mengajar (PMM), seperti yang disampaikan salah satu kepala sekolah:

"Sudah banyak informasi Propela yang disebarluaskan melalui PMM, selebihnya adalah bagaimana kita memanfaatkan."
(Informan 5: 2 Juli 2023)

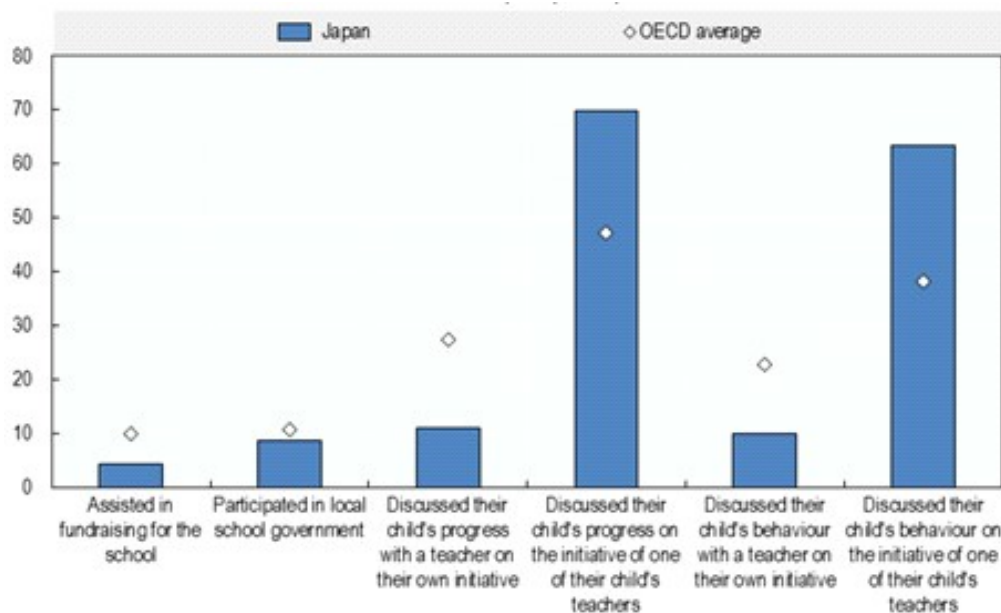
Berdasarkan wawancara, terdapat sekolah yang belum mengetahui penguatan karakter dan Propela secara utuh. Mereka belum mendapatkan buku, poster, atau konten digital Propela. Kendati data tidak bisa merepresentasikan keseluruhan, tetapi hal tersebut menunjukkan ada sebagian guru yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang penguatan karakter dan Propela.

Kegiatan-kegiatan pendukung penguatan karakter masih terbatas untuk guru dalam

cakupan yang juga terbatas. Program Roots Antiperundungan dan "Workshop Disiplin Positif Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila jenjang SMP di tahun 2023" hanya menjangkau sepertiga dari total SMP di Kabupaten Lebak. Kegiatan yang menyasar siswa berupa pakta integritas antiperundungan dan sosialisasi dari polisi dan dinas kesehatan yang bersifat seremonial dan dilaksanakan hanya setahun sekali.

Salah satu kelemahan dalam penguatan karakter di Kabupaten Lebak adalah belum ada ruang komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan komunitas untuk berpartisipasi dalam penguatan karakter. Dalam kegiatan P5 untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, orang tua dilibatkan dalam panen raya sebagai peserta. Di luar itu, keterlibatan orang tua dan informasi kepada dan dari orang tua untuk penguatan karakter masih sangat lemah. Berkaca dari Jepang (Gambar 5), komunikasi intensif orang tua dan guru berkontribusi positif pada kesuksesan pendidikan (OECD, 2018).

"... Hanya merokok yang sulit kami tanggulangi. Saya sudah bertemu dengan kedua orang tua siswa tersebut. Jawaban orang tua adalah "Aduh, orang tuanya juga



Gambar 5 Grafik Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan di Negara OECD
Sumber: (OECD, 2018)

tahu kalau anaknya merokok dan diperbolehkan. Bahkan merokok bersama di rumah.” (Informan 6: 2 Juli 2023).

“... Kondisi siswa sekolah dipengaruhi juga oleh kebijakan zonasi, sehingga siswa banyak berasal dari kalangan pedagang di pasar. Orang tua kurang mengawasi siswa karena kesibukan berdagang sehingga siswa terlambat ke sekolah, tugas tidak dikerjakan.” (Informan 5: 2 Juli 2023)

Kegiatan penguatan karakter di Kabupaten Lebak yang disebutkan di atas adalah bentuk intervensi yang hampir semuanya dilakukan pada tahun 2023 kecuali kegiatan dengan kepolisian sektor dan dinas kesehatan. Paparan Propela secara utuh di Kabupaten Lebak selama ini didorong oleh implementasi Kurikulum Merdeka dan persiapan survei karakter sebagai bagian dari Asesmen Nasional. Hal ini tercermin dari belum adanya sosialisasi langsung mengenai Propela ke sekolah-sekolah maupun melalui dokumen pemberitahuan resmi.

Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan atau disposisi pelaksana terhadap dasar dan tujuan kebijakan yang berupa kognisi, tanggapan, dan intensitas tanggapan memengaruhi implementasi kebijakan (Winarno, 2016). Jika pelaksana kebijakan memiliki tendensi positif ke arah kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan akan terimplementasi sesuai rencana melalui pengadaan petugas dan insentifnya (Putra & Khaidir, 2019).

Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sangat mendukung dan responsif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah komitmen dinas pendidikan dalam penuntasan isu kekerasan dalam pendidikan dengan membentuk satuan tugas dan memiliki jumlah sekolah terbanyak (183 SMP atau 81,3%) yang telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Provinsi Banten terhitung tiga bulan pasca Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Jajaran pimpinan di pemerintah daerah dan dinas pendidikan di Kabupaten Lebak mendukung kebijakan-kebijakan lain dalam payung penguatan karakter. Kendati demikian, dukungan belum spesifik terhadap penguatan karakter Propela. Oleh karena itu, disposisi positif ini perlu dimanfaatkan oleh analis kebijakan pada pemerintah pusat dan Kabupaten Lebak untuk memasukkan penguatan karakter dan secara spesifik Propela ke dalam rencana kerja tahunan maupun jangka pendek.

“... Wakil Bupati pada forum rapat dinas mengutarakan permasalahan pendidikan. Kabupaten Lebak sebagai daerah penyangga ibukota, perlu menjaga diri. Berpikir global bertindak lokal, supaya tidak terbawa arus globalisasi. Maka dari itu, penuntasan tiga dosa pendidikan, yaitu perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual sangat penting.” (Informan 3: 4 Oktober 2023)

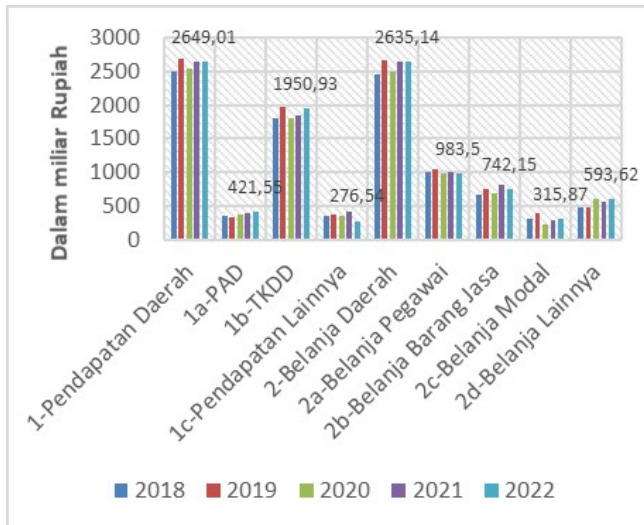
Berdasarkan wawancara, semua sekolah menunjukkan respon positif dan mendukung penguatan karakter Propela. Namun, kognisi atau pemahaman guru terkait Propela menjadi tantangan penanaman Propela pada SMP di Kabupaten Lebak. Disposisi positif harus diikuti dengan kompetensi yang sesuai agar implementasi kebijakan berjalan optimal (Nuraeni, Rustaman, Saefudin, & Hidayat, 2024).

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki pengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Lebak pada tahun 2022 adalah Rp22,09 triliun dengan pertumbuhan 3,44%. PDRB Kabupaten Lebak masih diurutan kedua terendah di Provinsi Banten (BPS Provinsi Banten, 2023).

Jika dilihat dari poster APBD tahun 2022, perekonomian Kabupaten, pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak hanya sebesar 16%

sehingga masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Belanja pemerintah relatif normal dengan 28% untuk belanja barang jasa, 12% untuk belanja modal, dan 37% untuk belanja pegawai (Kementerian Keuangan, 2023).



Gambar 6 Postur APBD Kabupaten Lebak Tahun 2022

Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Fleksibilitas penggunaan anggaran daerah berbanding lurus dengan pendapatan regionalnya (Ishak, Supriatna, Rufaedah, Nurhayati, & Sudjana, 2023). Minimnya pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak menyebabkan terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya mendukung urgensi penguatan karakter baik secara politik maupun sosial.

Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana meliputi kuantitas dan kualitas staf dalam institusi, tingkat kontrol hierarki terhadap pengambilan keputusan, dukungan lembaga politik, vitalitas organisasi, hingga hubungan pembuat dan pelaksana kebijakan (Hartawan & Kosasih, 2023). Terkait penguatan karakter, berdasarkan wawancara dengan Informan 4 ditemukan bahwa vitalitas dinas pendidikan dan pengawasan kepada sekolah-sekolahnya memengaruhi implementasi kebijakan.

"... Permasalahan yang sekarang dirasakan adalah SDM. PDPK dengan jumlah pegawai tiga termasuk saya (di jenjang SMP) memiliki ruang gerak yang terbatas dan kesulitan kalau untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di selatan. Kami biasanya hanya menerima laporan kegiatan dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga mungkin belum pernah secara khusus melakukan monev untuk penguatan karakter ya..'" (Informan 4: 4 Oktober 2023).

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP masing-masing hanya mencapai 97,19% dan 72,06%. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah hanya 43,76% ruang kelas SMP dalam kondisi baik, sisanya rusak ringan (25,21%), sedang (27,34%), dan berat (3,69%) (Kemendikbudristek, 2022). Rapor Pendidikan 2022 juga menunjukkan capaian pembelajaran jenjang SMP dalam indeks literasi dan numerasi masih di bawah kompetensi minimum dan berada di kuintil terbawah dibandingkan kabupaten dan kota secara nasional (Pusat Asesmen Pendidikan, 2022).

Permasalahan akses dan capaian dasar pendidikan menjadi perhatian utama dinas pendidikan. Hal ini terbukti dari rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2019-2024 yang memprioritaskan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan BPMP Provinsi Banten, Kabupaten Lebak pada tahun 2023 mendapatkan pendampingan yang lebih difokuskan pada masalah literasi dan numerasi

"... Permasalahan capaian pendidikan memang tidak bisa langsung serentak diselesaikan, karena adanya keterbatasan anggaran, SDM, dan lainnya. BPMP juga memiliki keterbatasan. Dinas Pendidikan Lebak saat ini condong untuk menuntaskan permasalahan literasi dan numerasi terlebih dahulu." (Informan 2: 15 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah informan 5 s.d. 8 dan hasil observasi kunjungan ke sekolah (Lihat Tabel 3), kelemahan penguatan karakter di sekolah terlihat dari minimnya perangkat pendukung seperti buku dan modul penguatan karakter di sekolah pada saat penelitian ini dilakukan. Konten kampanye Propela seperti banner, poster, dan infografis belum banyak terpasang di dinding atau mading sekolah. Belum semua sekolah menyusun kesepakatan yang mendukung penguatan karakter oleh guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah.

Tabel 3 Identifikasi Perangkat Pendukung

Sekolah	Konten Kampanye	Buku/Modul	Kesepakatan Sekolah
Sekolah A	AT	T	AT
Sekolah B	AT	T	AT
Sekolah C	AT	T	AT
Sekolah D	T	T	T
Sekolah E	AT	T	AT
Sekolah F	A	T	AT

Keterangan: A = Ada, T = Tidak ada, AT = Ada, tetapi tidak spesifik Propela
 Sumber: Wawancara dan Observasi Sekolah (2023)

Saat ini belum ada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terkait penguatan karakter ke sekolah. Dari sisi pemerintah pusat, evaluasi terhadap dinas pendidikan dilakukan oleh Puspeka dan evaluasi terhadap siswa dilakukan oleh Pusat Asemen Pendidikan – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek melalui survei karakter. Namun, evaluasi ini terlalu bergantung pada data kuantitatif yang terkadang kurang mampu menjelaskan realita di lapangan (Wond & Macaulay, 2010). Padahal,



Gambar 7 Poster Kampanye di Sekolah F

informasi bagaimana proses implementasi dan apa yang menjadi tantangan di setiap daerah dapat diperoleh jika setiap daerah melakukan fungsinya dalam hal evaluasi.

Berdasarkan analisis model implementasi Van Meter dan Van Horn, terdapat empat masalah pokok pada penguatan karakter pada jenjang SMP di Kabupaten Lebak. Empat permasalahan tersebut adalah ketiadaan dokumen kebijakan penguatan karakter, belum meratanya pemahaman guru terhadap Propela, pasifnya pelibatan komunitas, dan minimnya partisipasi orang tua siswa. Permasalahan tersebut menyebabkan penguatan karakter bersifat pasif, sehingga laju capaian penguatan karakter lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.

Strategi Percepatan Implementasi

Untuk meningkatkan partisipasi aktif ekosistem pendidikan dalam penguatan karakter, berikut adalah rekomendasi strategi untuk mempercepat implementasi kebijakan penguatan karakter.

Advokasi Penyediaan Landasan Kebijakan

Penguatan karakter perlu menjadi salah satu perhatian tambahan dalam pendidikan di Kabupaten Lebak. Perangkat daerah terutama sekretariat daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah/bappeda perlu didorong dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) terkait urgensi dari penguatan karakter sebagai bentuk komunikasi pembangunan (Far, 2022).

Dukungan ini dapat berasal dari dinas pendidikan dan/atau rekomendasi pemerintah pusat. Penelitian terkait yang dipublikasi dalam jurnal ataupun makalah kebijakan dari analisis kebijakan baik dari dalam maupun di luar Kemendikbudristek dapat mendukung advokasi penguatan karakter kepada pemerintah daerah (Rahim, Fatona, Rozani, Santoso, & Sukamsi, 2023).

Komitmen untuk penguatan karakter dapat diwujudkan dengan teridentifikasinya penguatan karakter dalam indikator kinerja daerah. Indikator tersebut akan menjadi landasan dinas pendidikan untuk melaksanakan program dan kegiatan penguatan karakter di Kabupaten Lebak dan penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Peningkatan Kapasitas dan Peran Guru

Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mereplikasi program yang dilakukan instansi lain seperti Program Roots Antiperundungan dan *workshop* disiplin positif. Hal tersebut dilakukan dengan cara memfasilitasi guru peserta kegiatan program untuk mendiseminasikan kepada guru di sekolah sekitarnya. Selain itu, dinas pendidikan dapat mengamplifikasi sasaran program instansi lain yang menyasar guru di Kabupaten Lebak dengan memfasilitasi tambahan peserta.

Kedua, setiap sekolah setidaknya memiliki guru yang terlatih dan tertarik dalam penguatan karakter siswa. Guru ini berperan untuk memfasilitasi dan mendorong guru lain mengintegrasikan penguatan karakter dalam

aktivitas di sekolah (Harita, Laia, & Zagoto, 2022). Posisi ini merupakan tanggung jawab guru BK atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai alternatif. Terbatasnya guru BK menjadi catatan penting di Kabupaten Lebak. Peningkatan kapasitas guru tentang penguatan karakter dapat dilakukan dengan menginisiasi kolaborasi antara komunitas Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), dinas pendidikan, UPT atau satker Kemendikbudristek.

Ketiga, sekolah perlu memiliki kebijakan terkait penguatan karakter yang mengatur guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah dalam interaksi di sekolah. Penyusunan tata tertib kelas/sekolah, kode etik guru, dan AD/ART sekolah dapat mendorong partisipasi aktif guru sebagai panutan di sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif mendukung penguatan karakter Propela (Aldridge & McChesney, 2018) yang kemudian berdampak positif terhadap peningkatan iklim lingkungan sekolah (Noboru, Amalia, Hernandez, Nurbaiti, Affarah, Nonaka *et al*, 2021).

Keempat, tersedianya daftar praktik baik pembiasaan Propela yang memberikan banyak alternatif bagi guru terkait pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi siswa di sekolahnya. Hal ini sekaligus memastikan setiap dimensi, elemen, dan subelemen Propela telah dikenalkan dan dibiasakan kepada siswa. Puspeka dapat mengoordinasi satker Kemendikbudristek dan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan komunitas pendidik untuk mengompilasi daftar praktik baik ini ke dalam buku saku atau infografis yang disebarluaskan pada Platform Merdeka Belajar atau laman lainnya. Konten berupa poster, infografis, ilustrasi, dan lain-lain juga dapat diproduksi oleh Kemendikbudristek, dinas pendidikan, sekolah, bahkan masyarakat umum.

Peningkatan Partisipasi Orang Tua

Orang tua memiliki pengaruh dan dapat berkontribusi positif jika berpartisipasi dalam

pendidikan karakter (Birhan, Shiferaw, Amsalu, Tamiru, & Tiruye, 2021; Hermino & Arifin, 2020). Partisipasi aktif orang tua dapat terwujud jika telah memiliki pemahaman Propela dan menyadari pentingnya kesinambungan proses penguatan karakter di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Guru harus lebih aktif menjelaskan perkembangan karakter siswa kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua memberikan umpan balik kepada guru dan membiasakan Propela secara aktif di rumah.

Peran serta orang tua dapat ditingkatkan dengan memberikan panduan Propela jenjang SMP kepada orang tua. Panduan ini dapat disampaikan dalam pertemuan di sekolah atau melalui media sosial seperti WhatsApp. Penyusunan panduan ini adalah tanggung jawab Kemendikbudristek. Puspeka telah menerbitkan buku pendamping Propela untuk orang tua jenjang PAUD dan SD di tahun 2023 seperti yang terlihat di Gambar 8 dan perlu menyusun untuk jenjang SMP dan jenjang setelahnya.

Pelibatan Mitra Pendidikan

Penguatan karakter dalam intra dan kokurikuler telah masuk ke dalam Kurikulum Merdeka dan P5. Mitra pendidikan yang berasal dari komunitas, yayasan, atau organisasi pendidikan dapat berpartisipasi dalam penguatan karakter melalui program ekstrakurikuler (Rahayu & Dong, 2023). Mitra pendidikan berperan sebagai pengonsek program, tenaga ahli, atau penyedia dana dalam program penguatan karakter di sekolah. Mitra pendidikan dapat berasal dari yayasan, organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga penelitian, lembaga pengabdian, *corporate social responsibilities (CSR)* swasta, dan organisasi profesi bidang pendidikan. Mitra pendidikan ini dapat mereplikasi keberhasilan Program Organisasi Penggerak dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek.



Gambar 8 Cover Buku Pendamping Propela Orang Tua Produksi PUSPEKA (2023)

Dinas pendidikan perlu memfasilitasi pertemuan atau komunikasi antara sekolah dan mitra pendidikan. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan melalui kegiatan berbentuk forum. Mitra pendidikan menyiapkan program ekstrakurikuler yang mengarah pada penguatan karakter. Dukungan mitra dapat berupa perangkat ajar, pedoman, peralatan, anggaran, atau kompetensi staf. Sekolah berkontribusi dalam menyiapkan data ekstrakurikuler dan peserta didik di sekolah. Dinas pendidikan atau Kemendikbudristek dapat memfasilitasi pertukaran data ini.

Komitmen implementasi program dapat terwujud dengan penyusunan kesepakatan atau perjanjian, penyusunan prosedur operasional standar terkait alur kerja, serta peran mitra pendidikan, sekolah, orang tua, siswa, dan dinas pendidikan. Pelaksanaan kegiatan perlu pengawasan dan evaluasi dari dinas pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi penguatan karakter jenjang SMP di Kabupaten Lebak masih mengalami beberapa permasalahan berdasarkan analisis model implementasi Van Meter dan Van Horn. Tidak tersedianya standar dan tujuan kebijakan

menyebabkan tidak adanya landasan hukum bagi perencanaan program, penyediaan sarana prasarana, dan pengadaan sumber daya manusia. Dinas pendidikan Kabupaten Lebak juga tidak memiliki indikator capaian penguatan karakter yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Terkait sumber-sumber kebijakan terutama sumber daya manusia, terdapat kesenjangan pemahaman guru terkait pembiasaan Propela di sekolah, di samping jumlah guru Bimbingan Konseling yang terbatas.

Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan dikemas secara terbatas tanpa intervensi langsung dari dinas pendidikan. Sebagian sekolah melaksanakan program dari instansi luar daerah dan seluruh sekolah melaksanakan penguatan karakter berbasis kurikulum dan panduan kegiatan seperti panduan MPLS. Pejabat publik, orang tua, dan masyarakat belum terlihat memberikan dorongan pada implementasi penguatan karakter Propela di sekolah.

Pada aspek pelaksana, Karakteristik badan pelaksana yaitu dinas pendidikan kabupaten belum memiliki cukup vitalitas untuk menyelesaikan masalah karakter bersamaan dengan literasi dan numerasi. Sisi positif implementasi adalah kecenderungan pelaksana yaitu dinas pendidikan maupun sekolah bersikap terbuka dan responsif terhadap program penguatan yang datang dari pemerintah pusat.

Penguatan karakter merupakan kebijakan kolaboratif yang bergantung pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, hingga pelibatan mitra pendidikan. Oleh karena itu, aksi kolaboratif masih membutuhkan pendorong agar dapat berjalan efektif.

Saran

Pemerintah pusat memiliki peran penting untuk dapat membantu percepatan implementasi penguatan karakter di jenjang SMP di Kabupaten Lebak. Untuk itu, pemerintah pusat perlu secara proaktif mengadvokasi kebijakan penguatan karakter dengan berbasis data. Advokasi tidak hanya diberikan kepada dinas pendidikan, tetapi kepada perangkat daerah lain seperti sekretariat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah/BAPPEDA, dan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penyediaan peta jabatan yang berhubungan dengan penguatan karakter.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak harus secara aktif melakukan diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas terkait penguatan karakter bagi para guru terutama di sekolah dengan indeks karakter rendah. Untuk mengatasi masalah anggaran, pelaksanaan kegiatan dapat difasilitasi komunitas guru baik MGMP, MGBK, hingga MKKS. Webinar daring regional dengan berbagi praktik baik penguatan karakter seperti pada hasil penelitian ini juga perlu menjadi agenda rutin dinas pendidikan yang tidak menggunakan banyak anggaran.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dapat berkolaborasi untuk membuka akses informasi kepada masyarakat umum dan/atau mitra pendidikan. Terbukanya akses informasi terkait kondisi penguatan karakter di Kabupaten Lebak dapat menjadi potensi pintu masuk kerja sama dengan organisasi mitra.

PUSTAKA ACUAN

- Adriani, D., & Yustini, T. (2021). Anticipating the demographic bonus from the perspective of human capital in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(6), 141–152. doi.org/10.20525/ijrbs.v10i6.1377
- Aldridge, J. M., & McChesney, K. (2018). The relationships between school climate and adolescent mental health and wellbeing: A systematic literature review. *International Journal of Educational Research*, 88, 121–145. doi.org/10.1016/j.ijer.2018.01.012
- Anggraena, Y., Sufyadi, S., Maisura, R., Chodidjah, I., Takwin, B., Cahyadi, S., Felicia, N., Gazali, H., Wijayanti, M. A., Khoiri, H. M., Matakupan, S. J., Siantajani, Y., & Kurnianingsih. Sri. (2020). *Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila* (D. Koesoema & M. Sabri, Eds.). Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud RI.
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). Kurikulum Merdeka: Pemaknaan merdeka dalam perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 399–407. doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55749
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azwar, B. (2023). Pemahaman guru bimbingan konseling terhadap kurikulum merdeka belajar. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 63. doi.org/10.29210/1202322167
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. (2022). *Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka*. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/Dimensi_PPP.pdf
- Birhan, W., Shiferaw, G., Amsalu, A., Tamiru, M., & Tiruye, H. (2021). Exploring the context of teaching character education to children in preprimary and primary schools. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 100171. doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100171
- Blair, J. A. (2019). *Studies in Critical Thinking*. University of Windsor.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). *Ekonomi dan Perdagangan*. Badan Pusat Statistik. <https://banten.bps.go.id/>
- Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L., & Kim, Y. (2014). Moral character in the workplace. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107(5), 943–963. doi.org/10.1037/a0037245
- Creswell, J. W. (2012). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darling-Hammond, L., & Cook-Harvey, C. M. (2018). *Educating the whole child: Improving school climate to support student success*. Learning Policy Institute.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis. *SAGE Open*, 4(1), 215824401452263. doi.org/10.1177/2158244014522633
- Far, R. A. F. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem

- Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 11(1), 57–76.
- Hamzah, M. R., Mujiwati, Y., Khamdi, I. M., Usman, M. I., & Abidin, M. Z. (2022). Proyek Profil Pelajar Pancasila sebagai Penguatan Pendidikan Karakter pada Peserta Didik. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 553–559. doi.org/10.57008/jjp.v2i04.309
- Hansen, K., & Świdarska, A. (2023). Integrating open- and closed-ended questions on attitudes towards outgroups with different methods of text analysis. *Behavior Research Methods*, 56(5), 4802–4822. doi.org/10.3758/s13428-023-02218-x
- Harita, A., Laia, B., & Zagoto, S. F. L. (2022). Peranan Guru Bimbingan Konseling Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa SMP Negeri 3 Onolalu Tahun Pelajaran 2021/2022. *Counseling For All (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 40–52. doi.org/10.57094/jubikon.v2i1.375
- Harzer, C., Bezuglova, N., & Weber, M. (2021). Incremental Validity of Character Strengths as Predictors of Job Performance Beyond General Mental Ability and the Big Five. *Frontiers in Psychology*, 12. doi.org/10.3389/fpsyg.2021.518369
- Hermiono, A., & Arifin, I. (2020). Contextual Character Education for Students in the Senior High School. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1009–1023. doi.org/10.12973/eu-er.9.3.1009
- Ishak, J. F., Supriatna, I., Rufaedah, Y., Nurhayati, S., & Sudjana. (2023). The determinants factors of local government capital expenditure. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 141–147. doi.org/10.33830/jiapi.v4i2.164
- Jeynes, W. H. (2017). A meta-analysis on the relationship between character education and student achievement and behavioral outcomes. *Education and Urban Society*, 51(1), 33–71. doi.org/10.1177/0013124517747681
- Kemendikbudristek. (2022). *Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak*. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Lavy, S. (2020). A review of character strengths interventions in twenty-first-century schools: their importance and how they can be fostered. *Applied Research in Quality of Life*, 15(2), 573–596. doi.org/10.1007/s11482-018-9700-6
- Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, 63(4), 459–468. doi.org/10.1111/ped.14475
- Nuraeni, H., Rustaman, N., Saefudin, & Hidayat, T. (2024). *Improvement of the competence and affective disposition of junior high school teachers after the implementation of biodiversity literacy textbooks containing material on the local potency of West Java*. doi.org/10.18502/kss.v9i8.15486
- OECD. (2018). *Education Policy in Japan*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264302402-en>
- Pusat Asesmen Pendidikan. (2022). *Rapor Pendidikan Publik*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. https://pusmendik.kemdikbud.go.id/profil_pendidikan/
- Pusat Penguatan Karakter. (2021). *Profil Pelajar Pancasila*. <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/profil-pelajar-pancasila/>
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236–242.

- Rahayu, A. P., & Dong, Y. (2023). The Relationship of extracurricular activities with students' character education and influencing factors: A Systematic Literature Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(1), 459–474. doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2968
- Rahim, A., Fatona, N., Rozani, N.G., Santoso, B., & Sukamsi. (2023). Tinjauan Kualifikasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permen Pan No. 45 Tahun 2013. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 387–395. doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.85
- Ramdani, A., Jamaluddin, & Artayasa, I. P. (2023). Character education integrated inquiry e-book: Alternative media to minimize bullying of fellow students. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(1), 520–525. doi.org/10.29303/jppipa.v9i1.2516
- Hartawan, R. C., & Kosasih, F. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348-1358. doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230. doi.org/10.22146/jkn.67613
- Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah orientasi baru pendidikan dalam meningkatkan karakter siswa Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7076–7086. doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3274
- Satria, R., Adiprima, P., Wulan, K. S., & Harjatanaya, T. Y. (2022). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (Y. Anggraena, D. Setiyowati, F. Ghozali, M. H. I. Wibowo, A. Andiarti, & I. Herutami, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Shubert, J., Wray-Lake, L., Syvertsen, A. K., & Metzger, A. (2022). The role of family civic context in character development across childhood and adolescence. *Applied Developmental Science*, 26(1), 15–30. doi.org/10.1080/10888691.2019.1683452
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. doi.org/10.1177/009539977500600404
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Center of Academic Publishing Service).
- Wond, T., & Macaulay, M. (2010). Evaluating local implementation: An evidence-based approach. *Policy and Society*, 29(2), 161–169. doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.008